

GEOPOLITIK DAN GEOSTRATEGI DALAM MEWUJUDKAN INTEGRITAS NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA

Ermaya Suradinata*)

Setiap bangsa dalam rangka mempertahankan eksistensinya dan untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan nasionalnya perlu memiliki pemahaman geopolitik (Rudolf Kjellen, 1864-1922) dan geostrategi. Geopolitik adalah ilmu yang mempelajari hubungan antara faktor-faktor geografi, strategi dan politik suatu negara sedangkan untuk implementasinya diperlukan suatu strategi yang bersifat nasional. Geopolitik Indonesia diterjemahkan dengan istilah Wawasan Nusantara sedangkan dalam implementasinya telah disusun suatu pemahaman yang disebut dengan Ketahanan Nasional yaitu dari rumusan geostrategi.

Wawasan Nusantara merupakan konsep nasional mengenai kesatuan dan persatuan bangsa, dan negara Indonesia, sedangkan Ketahanan Nasional adalah konsep kelangsungan hidup (*survival*) bangsa dan negara dan diupayakan melalui pembangunan nasional yang meliputi segenap kehidupan nasional. Ketahanan Nasional adalah merupakan kondisi dinamis bangsa yang dalam mempertahankan eksistensinya selalu berhadapan dengan tantangan, ancaman, gangguan dan hambatan yang timbul. Ketahanan Nasional dapat diibaratkan seperti ketahanan tubuh kita yang selalu

berhadapan dengan berbagai serangan penyakit dan gangguan kesehatan lainnya. Oleh karena itu, Ketahanan Nasional yang pada suatu saat dinilai kokoh atau tangguh, pada saat yang lain dapat mengalami kemerosotan atau menjadi tidak kokoh. Hal ini sangat dipengaruhi oleh bagaimana kita membangun Ketahanan Nasional agar mampu mengatasi semua tantangan, ancaman, gangguan dan hambatan yang timbul.

Pada saat ini, kita menyadari bahwa Geostrategi yang dirumuskan dalam bentuk Ketahanan Nasional Indonesia, untuk mewujudkan integritas Negara

*) Ermaya Suradinata, Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional

Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), sedang mengalami kemerosotan yang sangat parah, yang dapat membahayakan eksistensi bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena itu, upaya meningkatkan kembali kekuatan Geopolitik dan Geostrategi Nasional Indonesia, adalah menjadi kewajiban segenap anak bangsa Indonesia, khususnya generasi penerus untuk meningkatkan komitmen terhadap kesatuan dan persatuan bangsa Indonesia dalam wadah NKRI. Selain itu, reformasi nasional yang sesuai dengan aspirasi rakyat dan kehidupan demokrasi yang ideal bagi kepentingan rakyat harus kita teruskan, seiring dengan perkembangan kemajuan masyarakat Indonesia.

Geopolitik dan Geostrategi Indonesia

Dalam rangka menelaah geostrategi, kita tidak boleh lepas dari landasannya terutama geopolitik dan konsepsinya adalah Ketahanan Nasional.

Geopolitik

Ilmu Geopolitik adalah pengetahuan yang mempelajari tentang potensi, yang dimiliki oleh suatu bangsa, atas dasar jatidirinya dan merupakan kekuatan, serta kemampuan untuk Keta-

hanan Nasional. Pada hakikatnya geopolitik mengajarkan agar dapat selalu diciptakan persatuan bangsa dan keutuhan wilayah NKRI, berdasarkan semangat Bhinneka Tunggal Ika yaitu untuk kesetaraan, keadilan, dan kebersamaan, serta kepentingan nasional.

Pada saat ini persatuan bangsa dan keutuhan wilayah terancam oleh berbagai gerakan separatis, baik yang sudah memiliki kekuatan bersenjata maupun yang masih dalam bentuk wacana. Kepentingan pribadi, golongan dan kelompok cenderung lebih dominan daripada kepentingan nasional. Kondisi krisis tidak/belum tertangani secara terpadu, karena para pemimpin/elite politik masih sibuk saling menyerang dan mempertahankan kepentingan pribadi, golongan dan kelompoknya. Kondisi seperti diuraikan di atas perlu kita analisis apa penyebabnya, sehingga kita tidak mengulangi kekeliruan yang sama di masa mendatang. Kekeliruannya terutama terletak pada pelaksanaan kebijaksanaan pembangunan nasional yang mengakibatkan kesenjangan sosial antarsektor, antargolongan/kelompok dan antara pusat dengan daerah. Di samping itu terdapat indikasi adanya berbagai kepentingan dari dalam dan luar negeri yang tidak sejalan dengan cita-cita dan

tujuan nasional, yang turut memanfaatkan kondisi kesenjangan sosial dan era reformasi untuk mencapai tujuannya.

Geostrategi

Konsepsi dasar dari geostrategi Indonesia adalah Ketahanan Nasional, berdimensi Astagatra, artinya segenap kehidupan nasional yang sangat kompleks dipetakan secara sederhana, namun tetap dapat mencerminkan kehidupan nasional yang nyata.

Astagatra meliputi Trigatra Alamiah dan Pancagatra Sosial. Trigatra Alamiah terdiri dari Geografi (wilayah), sumber kekayaan alam dan kependudukan. Sedangkan Pancagatra sosial terdiri dari ideologi, politik, ekonomi, sosial dan budaya, pertahanan dan keamanan disingkat Ipoleksosbudhankam. Geostrategi pada hakikatnya sangat tergantung dari kemampuan bangsa dalam mengelola dan memanfaatkan Trigatra Alamiah guna meningkatkan Ketahanan pada Pancagatra.

Telaahan Astagatra secara garis besar adalah sebagai berikut.

a) Pemanfaatan Trigatra Alamiah sampai saat ini cenderung kurang memperhatikan kelestarian lingkungan hidup (ekosistem), sehingga mengakibatkan berbagai bencana alam seperti banjir, tanah longsor, dan keba-

karan hutan. Di samping itu juga menimbulkan pencemaran air, lahan dan udara.

b) Kesadaran geografis bangsa Indonesia yang memilih tanah air nusantara yang luas dan memilih posisi strategis, masih sangat kurang. Pada umumnya masih berorientasi ke daratan, khususnya lingkungan tempat tinggalnya, sehingga kurang mampu memanfaatkan peluang dari kondisi wilayah yang luas dan strategis, serta memiliki potensi kekayaan alam yang beraneka ragam. Akibatnya bangsa lain yang lebih maju dapat menikmati keuntungan besar dari wilayah dan kekayaan alam Indonesia. Pencurian kekayaan ikan di laut teritorial Indonesia, proyek penambangan tembaga dan emas oleh Freeport di Irian Jaya dan Newmont di Sumbawa, serta di tempat lain, menunjukkan indikasi keuntungan besar yang diperoleh bangsa lain. Keadaan ini diperparah dengan penduduk Indonesia yang sebagian besar masih berpendidikan rendah dan masih sangat kuat keterkaitan dengan nilai-nilai budaya dan adat istiadat sukunya, sehingga merupakan potensi atau kerawanan terhadap terjadinya konflik horizontal antarsuku.

c) Pancasila tetap diakui oleh MPR sebagai falsafah hidup bangsa, dasar negara dan ideolo-

gi nasional. Namun nilai-nilai Pancasila cenderung diabaikan pengamalannya, baik dalam perumusan peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan, maupun dalam sikap dan perbuatan para pemimpin bangsa dan elite politik. Banyak terjadi konflik vertikal dan horisontal antarwarga bangsa, penyalahgunaan wewenang untuk kepentingan pribadi, golongan dan kelompok, baik di tingkat pusat maupun daerah.

d) Salah satu sasaran reformasi nasional adalah demokratisasi yang antara lain mengubah sistem pemerintahan yang sentralistik cenderung otoriter dan tertutup menjadi sistem pemerintahan yang desentralistik, demokratis dalam keterbukaan, serta menjunjung tinggi Hak Azasi Manusia (HAM). Namun wajah demokrasi kita saat ini cenderung menjurus ke anarkhi. Kelompok kepentingan berusaha mengerahkan massa dengan tindakan yang cenderung brutal dan melanggar hukum, untuk memaksakan kehendak. Golongan separatis dengan seenaknya melanggar hukum, berkampanye dan propaganda mempengaruhi opini masyarakat, serta melancarkan teror dan pemberontakan bersenjata, tanpa segera dapat ditumpas oleh aparat keamanan. Otonomi daerah yang dilaksanakan mulai

tahun 2001, dipahami oleh daerah otonom kabupaten dan kota cenderung kebablasan. Kepala Daerah Otonom dengan tidak sabar menuntut kewenangan dan alokasi dana yang masih menunggu peraturan pelaksanaannya. Untuk pelaksanaan otonomi daerah perlu ditinjau kembali, agar kewenangan propinsi dalam pelaksanaan otonomi daerah lebih besar dari kabupaten dan kota KKN di daerah otonom yang didasari *exclusivism* mulai muncul. Demikian pula konflik horisontal terjadi antarsuku, antarpenduduk asli dan pendatang, bahkan antardesa. Pemimpin bangsa dan elite politik di pusat sibuk bertikai berebut kekuasaan, sehingga kurang memberikan perhatian terhadap peraturan pelaksanaan untuk penyelenggaraan otonomi daerah.

(e) Reformasi nasional di bidang ekonomi belum mampu mengatasi krisis ekonomi dan moneter. Sektor riil belum berputar kembali, bahkan investor baru belum tertarik, dan investor lama telah menarik diri dari Indonesia, dengan alasan situasi keamanan dan perburuhan yang makin tidak kondusif bagi usahanya.

(f) Melalui sistem pendidikan nasional, pemerintah berusaha meningkatkan kesadaran kebangsaan Indonesia yang ber-

dasarkan semangat Bhinneka Tunggal Ika. Namun akibat keliruan pelaksanaan pembangunan pada masa lalu dan adanya kecenderungan penyeragaman, maka terjadi kesenjangan sosial dan perasaan kurang dihormatinya budaya dan adat istiadat daerah/lokal. Dalam situasi krisis yang disertai euforia reformasi sampai saat ini telah terjadi makin menguatnya kembali pengelompokan masyarakat berdasarkan primordialisme suku, etnis, agama, dan daerah.

Supremasi hukum yang menjadi salah satu sumber penting dalam reformasi nasional, masih merupakan impian. Berbagai kepentingan politik dan ekonomi turut mencampuri (intervensi) dalam upaya penegakan hukum. Aparat penegak hukum masih terkesan sebagai alat kekuasaan.

(g) Dalam rangka menjaga stabilitas keamanan, aparat keamanan menghadapi berbagai kendala, seperti: (1) trauma terhadap tuduhan pelanggaran HAM, (2) peraturan hukum dan perundang-undangan yang kurang kondusif bagi upaya pembinaan stabilitas keamanan bagi Polri dan TNI, di mana Polri dan TNI dipisahkan secara hitam putih. Polri bertanggung jawab terhadap keamanan dalam negeri, sedangkan TNI hanya bertanggung jawab terhadap

pertahanan untuk mengatasi musuh dari luar negeri. Padahal pada akhir abad ke-20 dan awal abad ke-21 ini, ancaman dari dalam negeri pasti ada kaitannya dengan luar negeri. Contoh GAM di Aceh, sebagian pernah dilatih di Libya, mendapat bantuan senjata dari luar negeri dan didukung oleh kegiatan diplomasi di dunia internasional, (3) alat peralatan Polri dan TNI beserta dukungan logistik dan kesejahteraan anggotanya sangat tidak memadai. Salah satu contoh: kapal patroli Polri kalah cepat dengan kapal pencuri ikan, (4) kesadaran bela negara dan disiplin dari warga bangsa Indonesia pada umumnya cenderung menurun. Bahkan ada yang masih terus menghujat dan memojokkan TNI, terus mencurigai TNI dengan tuduhan TNI anti demokrasi, ingin kembali ke dunia politik dan berkuasa.

Kondisi seperti tersebut di atas memberikan peluang bagi para pengganggu keamanan dan gerakan separatis leluasa melakukan kegiatannya yang mengakibatkan stabilitas keamanan terus terpuruk, krisis ekonomi dan moneter terus berkelanjutan, kesejahteraan rakyat pada umumnya makin merosot. Selanjutnya masyarakat cenderung kembali kepada pengelompokan primordial suku, etnis, agama dan daerah, bangsa Indonesia

berada di ambang perpecahan (desintegrasi). Namun walaupun dengan potensi dan peluang sekecil apa pun, bangsa Indonesia terutama para pemimpin bangsa, elite politik dan para pemuda harus memilih tekad dan semangat juang yang tinggi untuk meningkatkan kembali persatuan bangsa dan Ketahanan Nasional dalam wadah NKRI.

Demokrasi yang Ideal

Tatanan demokrasi yang ideal bagi suatu negara pada umumnya adalah suatu tatanan demokrasi yang sesuai dengan kehidupan budaya rakyat yang bersangkutan, tingkat kemajuan berpikir masyarakat dan kemampuan perekonomian nasional yang mampu makin menyejahterakan rakyat. Bagi Indonesia sebagai negara berkembang yang juga sedang diupayakan oleh gelombang reformasi dewasa ini adalah demokrasi Pancasila yang dapat mengembalikan kehidupan nasional kita pada pola yang memenuhi persyaratan-persyaratan kehidupan nasional yang sesuai dengan kehidupan budaya bangsa.

Demokrasi Pancasila adalah suatu tatanan demokrasi yang paling sesuai bagi kehidupan berbangsa dan bernegara bagi Indonesia dan dalam hubungan ini, tiga aspek yakni aspek politik,

aspek ekonomi dan aspek keadilan sangat mewarnai terwujudnya demokrasi Pancasila.

Pada dimensi politik, kehidupan demokrasi akan dirasakan dengan adanya suatu suasana yang mengkombinasikan kebebasan, persamaan dan permufakatan untuk menyelesaikan tiap-tiap perbedaan dengan cara-cara damai. Khususnya kebebasan, hal ini harus berlangsung dalam suasana yang didukung oleh hak-hak dan kewajiban-kewajiban konstitusional, dasar-dasar hukum dan cara-cara hidup yang etis. Tiga arahan ini adalah tiang yang menyangga tatanan budaya politik yang demokratis, sedangkan kebebasan yang mengesampingkan hukum dan konstitusi, lebih-lebih jika dengan sengaja menentang adalah tirani yang jelas-jelas mengeliminir demokrasi.

Diterima dan dihayatinya nilai-nilai yang terkandung dalam falsafah Pancasila antara lain akan berwujud dengan adanya keseimbangan antara kebebasan warganegara untuk menyatakan kemandiriannya termasuk dalam bidang politik dan penguasa dengan yang membina dan mempertahankan stabilitas, persatuan dan integritas institusi-institusi politik yang berfungsi sebagai infrastruktur atau suprastruktur yang akan memi-

lih otonom yang sesuai dengan fungsinya sebagai kolektor dan komunikator aspirasi rakyat. Dengan demikian, akan tercipta kebijakan-kebijakan yang tidak hanya dapat diterima dan dimungkinkan tetapi juga merupakan legitimasi sistem politik yang berlaku.

Dengan kata lain, sosialisasi nilai-nilai demokrasi harus mengandung identitas nasional yang diciptakan dan didorong oleh nilai-nilai persatuan dan permusyawaratan. Berlomba (*contestancy*) dan partisipasi yang merupakan ciri penting dalam demokrasi universal harus merupakan bagian dalam sistem, sehingga kita tidak akan terperosok dalam anarkhisme. Di sisi lain kekuasaan negara melakukan kewajiban menjamin stabilitas dan integritas harus dapat terselenggara tanpa adanya kecurigaan-kecurigaan yang mengarah pada otoriterisme.

Dalam hubungannya dengan ekonomi nasional, konsep ekonomi harus ditumbuhkan dengan pengertian keterbukaan dan transparansi yang lebar untuk masyarakat untuk turut serta dalam proses ekonomi nasional. Melaksanakan demokrasi ekonomi kerakyatan berarti menciptakan kondisi yang memberikan kesempatan kepada masyarakat bawah untuk berpartisipasi menerima dan mem-

beri masukan-masukan. Di samping itu, masyarakat hendaknya juga memilih hak dan menggunakannya untuk memberikan peringatan jika perekonomian negara bergerak ke arah suatu sistem ekonomi yang menyalahi ketetapan-ketetapan yang telah disetujui bersama.

Dengan suatu tata kehidupan ekonomi yang mantap, kita akan mampu menahan inflasi secara mantap dan menekan pengangguran seminimal mungkin dan pada waktu yang sama kita akan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi secara teratur dan terencana.

Dalam mengupayakan demokratisasi dalam hubungannya dengan pembinaan hukum dan keadilan, yang diperlukan adalah mengeluarkan peraturan-peraturan yang menjamin terselenggaranya kehidupan sosial, ekonomi dan budaya yang mampu untuk menampung nilai-nilai kebebasan dan persamaan berdasarkan kesatuan dan persatuan. Demokrasi tidak hanya diartikan sebagai suatu sistem kehidupan yang bebas, namun harus bersandarkan keteraturan dan disiplin nasional. Rakyat Indonesia pada hakikatnya memiliki hak untuk mendapatkan perlakuan dengan cara-cara yang adil, jujur dan menurut hukum, tidak saja dari pihak penguasa tetapi juga dari sesama wargane-

gara. Hanya dengan peraturan-peraturan yang lengkap dan komprehensif yang akan dilaksanakan tanpa memihak, hak-hak azasi rakyat dapat terjamin. Dengan demikian, tidak akan ada tirani dari penguasa dan dari sesama warganegara. Secara singkat, dalam alam demokrasi Indonesia, negara utamanya merupakan suatu sistem hukum yang harus mendapat prioritas utama dalam agenda nasional.

Melihat hal-hal tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa demokrasi adalah inti budaya manusia dan dalam hubungan ini keberadaan peraturan-peraturan yang secara mantap dapat dilaksanakan sebagai penegakan hukum yang ditakukan oleh abdi-abdi negara yang berdedikasi, adalah satu jaminan terselenggaranya kehidupan demokrasi oleh negara dan bangsa.

Demokrasi, Otoriter, dan Anarki

Demokrasi adalah salah satu sistem kenegaraan yang diselenggarakan oleh rakyat atau atas nama rakyat. Di samping demokrasi, ada sistem kenegaraan lainnya, yaitu oligarki dan tirani. Sejak revolusi Perancis sampai awal abad ke-21, demokrasi dianggap sebagai sistem kenegaraan yang terbaik. Na-

mun sejak 2000 tahun yang lalu, Plato dan Aristoteles telah mengisyaratkan agar berhati-hati dengan demokrasi, karena di samping sangat baik, juga dapat sangat kejam, karena dapat timbul anarkhi atau otoriter.

Beberapa negara di Amerika Latin dan Afrika, juga Indonesia di era Orla dan Orba, terjadi demokrasi yang otoriter. Sebaliknya Indonesia di era reformasi nasional sampai saat ini menjurus ke anarkhi yang nyaris menjadi Indonesia porak poranda.

Beberapa negara Barat sangat menyadari bahaya kekerasan dan anarkhi dalam sistem demokrasi yang cenderung mende-wakan kebebasan rakyat. Dalam menata kebebasan rakyat, pemerintah menyiapkan perangkat hukum yang dapat diterapkan seketika bila terjadi pelanggaran yang mengatasnamakan rakyat. Namun demikian, juga disiapkan semacam insentif bagi masyarakat yang tidak mempunyai pekerjaan tetap berupa santunan atau tunjangan jaminan hidup, serta imbalan yang setimpal kepada petugas/aparatur negara sesuai dengan tugas dan kewajibannya, sehingga dapat dihindarkan terjadinya tindakan anarkhis dari rakyat maupun aparatur negara.

Seiring dengan munculnya AS sebagai negara Super Power

tunggal, mereka mengklaim negaranya sebagai kampiun demokrasi dan mengkampanyekan secara terbuka beberapa kriteria demokrasi, antara lain: (a) adanya kebebasan penuh bagi rakyat untuk menentukan pilihan dan pendapatnya, (b) tidak ada tekanan kekerasan militer, (c) bebas dari tekanan agama, (d) Adanya pengawasan dari masyarakat, (e) Menghormati HAM.

Kriteria tersebut sangat ideal, namun jika melihat di lapangan khususnya di negara-negara berkembang dengan kemampuan sumber daya manusia dan ekonomi yang terbatas, akan melahirkan anarkhi. Selanjutnya negara berkembang tersebut akan menjadi sasaran mudah bagi negara maju yang sudah mapan untuk menanamkan pengaruhnya.

Tatanan Demokrasi yang Ideal

Tatanan demokrasi yang ideal bagi negara berkembang seperti Indonesia adalah yang sesuai dengan tingkat kemajuan berpikir masyarakat dan kemampuan perekonomian nasional yang mampu makin menyejahterakan rakyat. Negara-negara maju sangat menyadari bahwa proses berdemokrasi memerlukan beberapa persyaratan, antara lain: (a) memiliki kesadaran

berbangsa dan nasionalisme yang tinggi, (b) Memiliki kebebasan jiwa dan sportif, (c) Konstitusional, (d) terjaminnya keamanan, (e) bebas dari campur tangan asing.

Persyaratan tersebut di atas sengaja tidak disebar, bahkan cenderung ditutupi, karena belum dapat dipenuhi oleh negara-negara berkembang, meskipun tetap dipaksakan untuk menerapkan demokrasi gaya AS, sehingga terjadi kekalutan di negara berkembang termasuk Indonesia.

Wajah demokrasi Indonesia yang diwarnai oleh kekalutan ini antara lain disebabkan: (1) Kondisi internal Indonesia yang sangat mempercayai kebaikan demokrasi, tanpa menyadari bahayanya dan persyaratan yang diperlukan (2) tidak/belum berhasilnya pemerintah mengatasi krisis dan meningkatkan kembali kesejahteraan rakyat, (3) digulirkannya isu global dalam bentuk demokratisasi sekuler, HAM dan politik global negara maju, (4) tuduhan, pemutarbalikan fakta, dan tuntutan yang berlebihan terhadap kesalahan aparat keamanan di masa lalu, sehingga mereka terkesan sangat biadab, sehingga timbul kebencian dan dendam yang tidak ada habisnya.

Tatanan demokrasi yang ideal seyogyanya disesuaikan de-

ngan kemajuan taraf pendidikan dan kesejahteraan masyarakat dan nilai-nilai budayanya yang beraneka ragam. Demokrasi Indonesia seyogyanya ditata: (1) secara konstitusional, di mana hubungan antara lembaga tertinggi dengan lembaga tinggi negara perlu diatur secara sinergik dalam kebersamaan dalam rangka mencapai tujuan nasional yang diatur dalam UUD 1945. Pancasila tetap sebagai falsafah/pandangan hidup bangsa, dasar negara dan ideologi nasional yang melandasi kehidupan berbangsa dan bernegara. Adanya perangkat hukum yang mengatasi kebebasan rakyat untuk mencegah anarkhi dan membatasi kekuasaan aparat negara, agar tidak menjurus ke otoriter. Hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah otonom diatur dengan UU yang tetap mengacu pada Ketahanan Nasional dan NKRI, (2) secara bertahap perlu ditingkatkan kembali kesadaran kebangsaan Indonesia yang berdasarkan semangat Bhinneka Tunggal Ika. Di samping itu diperlukan disiplin, kebesaran jiwa dan sportivitas, (3) kesejahteraan rakyat yang berkeadilan dengan melancarkan kembali pembangunan nasional untuk mengurangi kesenjangan sosial ekonomi, (4) stabilitas keamanan yang mantap yang didukung

oleh peraturan hukum perundang-undangan dan kesadaran bela negara masyarakat, serta dapat ditumpasnya gerakan separatis bersenjata dan gangguan keamanan lainnya.

Disintegrasi Bangsa

Secara harafiah disintegrasi bangsa bermakna hilangnya kaitan integratif antar unsur-unsur kekuatan bangsa, sehingga hubungan menjadi longgar dan pada gilirannya asas kekeluargaan ditinggalkan. Selama kurun waktu 3 tahun terakhir ini para elite politik telah mendemonstrasikan secara vulgar cara-cara menyulut disintegrasi bangsa. Terlalu salahkah kalau pengikutnya masing-masing menyanyikan irama serupa?

Bila dilihat dan segi geopolitik dan geostrategi, maka anasir disintegrasi dapat dibedakan antara anasir luar dan dalam negeri.

Anasir Luar

Sejak sirnanya Uni Soviet, Barat muncul sebagai pemenang ideologi dan sekaligus merasa sebagai pemenang "budaya". Dalam suasana euforia semacam itu muncullah keyakinan dalam masyarakat Barat, bahwa nilai-nilai yang mereka anut adalah superior dan harus dipaksa-

kan ke seluruh dunia dengan rumusan bahwa sistem nilai yang mereka anut memilih kebenaran dan juga validitas universal. Sebagai contoh salah satu tujuan strategi Amerika Serikat di kawasan Asia Pasifik adalah mendorong dan mendukung proses demokratisasi (tentu saja demokratisasi sesuai dengan yang berlaku di sana). Sudah barang tentu tujuan itu dapat dijabarkan menjadi tindakan nyata dalam bentuk terbuka maupun tertutup (subversi) dengan menghalalkan segala cara, dan yang paling murah dan kecil resiko fisiknya adalah melalui uang.

Tindakan terbuka antara lain memberikan bantuan peningkatan kualitas SDM Indonesia, khususnya generasi muda, melalui penyediaan informasi secara luas dan terbuka, bantuan pendidikan di luar negeri, pertukaran siswa, tenaga profesional, dan sebagainya. Upaya terbuka ini dengan sangat mudah ditumpangangi dengan muatan kebebasan berpikir dan mengemukakan pendapat, supremasi budaya Barat, dan sebagainya. Bahkan pertukaran misi kebudayaan dapat dijadikan wahana yang baik untuk maksud tersebut, apalagi film atau sinetron. Sedangkan tindakan tertutup, antara lain, bisa berupa pengadudombaan antara kekuatan dalam ma-

sarakat, mempengaruhi pemilihan pejabat penting (apalagi jabatan presiden), perumusan kebijaksanaan dan sebagainya.

Usaha mereka pun mendapat dukungan berbagai peluang dalam melancarkan tindakan subversi, antara lain, adanya bibit pertentangan yang multi dimensional di dalam negeri, adanya kebiasaan korupsi dan *money politics*, dan sebagainya, serta ditambah lagi dengan adanya kenyataan bahwa aparat intelijen dan TNI sedang terus dihujat, sehingga tumpul sekali.

Pertanyaan selanjutnya adalah: "Apakah Indonesia akan selalu menjadi sasaran intervensi dan subversi asing?" Jawabannya "ya", karena beberapa hal: (a) secara geopolitik Indonesia "menduduki" *Sea Lines of Communication* (SLOC) atau alur pelayaran vital antara Samudera Pasifik dan Samudera Hindia, sehingga Indonesia harus pro Barat dan sekurang-kurangnya akomodatif terhadap kepentingan Barat. Dari 7 (tujuh) selat strategis dunia, 4 (empat) berada dalam wilayah kedaulatan Indonesia. Sudah barang tentu, menurut pandangan geopolitik Alfred Thayer Mahan, Indonesia memiliki *bargaining power* yang kuat berupa *choke-points* dalam pengendalian lalu lintas laut yang melewati SLOC, (b) dalam suasana kecemasan pihak Barat

terhadap perkembangan Islam yang dahsyat, mereka melihat Indonesia merupakan negara yang moderat. Karena itu ada kepentingan menjaga Indonesia, agar tetap moderat dan bersahabat. Untuk itu harus dilakukan berbagai bentuk subversi, (c) potensi Indonesia sebagai penjur ASEAN (atau memiliki *power position* di Asia Tenggara), dengan luas wilayah setengah dari seluruh wilayah Asia Tenggara. "memegang" Indonesia berarti "memegang" ASEAN dan ini merupakan aset politik yang luar biasa dalam rangka membendung pengaruh Cina yang oleh pihak Barat dipersepsikan sebagai ancaman masa depan.

Karena itulah kita sekalian tidak boleh, dengan menganggap bahwa dalam pemilihan Presiden tidak akan ada intervensi luar. Indonesia terlalu "berharga" untuk dibiarkan jatuh ke dalam lingkaran *sphere of influence* yang tidak/kurang bersahabat dengan Barat.

Anasir Dalam

Modernisasi di segala bidang ternyata telah memperlebar irisan pemilahan di tengah-tengah masyarakat; sesuatu yang selalu menjadi kekhawatiran dan obsesi para pendiri republik. Mulai dari pemilihan bahasa nasional, yang bukan berasal dari

bahasa daerah suku yang mayoritas dapat merupakan unsur integratif. Kita harus selalu ingat dan waspada bahwa bangsa kita bernegara adalah berkat kesepakatan, karena itu tidaklah tepat apabila demi demokratisasi semua kesepakatan diabaikan.

Kerawanan yang melekat pada diri bangsa setiap saat dapat mengemuka menjadi unsur disintegratif yang mematikan, antara lain adalah (a) ketimpangan pertumbuhan antara Indonesia bagian Barat dengan pertumbuhan bagian Timur, dan juga antara Jawa dengan luar Jawa. Sesungguhnya hal ini bukan merupakan kesengajaan pemerintah (sejak zaman kolonial), akan tetapi dapat dipersepsikan secara keliru, bahwa ada unsur kesengajaan dari pihak Pusat untuk menelantarkan daerah-daerah yang kurang maju. Lebih buruk lagi, ketimpangan yang terjadi diinterpretasikan sebagai ketidakadilan pemerintah pusat. Bukankah hal ini pernah memicu berbagai jenis pemberontakan bersenjata di masa lalu? Apa yang terjadi sekarang ini di Aceh, Maluku dan Irian Jaya adalah merupakan pengulangan dari yang pernah belajar dari kesalahan masa lalunya. Padahal kalau dilihat secara jernih, faktor curah hujan yang lebih banyak, tanah yang lebih subur, tersedianya tenaga terampil yang cu-

kup mendorong Indonesia bagian Barat terutama pulau Jawa lebih mudah berkembang.

Sedangkan untuk masalah pemasaran, jumlah penduduk yang besar merupakan sesuatu hal yang mendorong kegiatan perekonomian yang lebih cepat dari pada di Timur, belum lagi sistem sirkulasi yang baik untuk ekspor. Akan tetapi memang harus diakui bahwa kenyataan-kenyataan semacam ini akan selalu terbenam di bawah timbunan kemarahan terhadap pemerintah pusat, apalagi kalau dicampuri oleh kehadiran para provokator seperti di Ambon dan tempat-tempat lainnya. Rasa tentang adanya ketidakadilan (belum tentu seluruhnya benar) di tangan para petualang politik dapat memicu konflik SARA yang memang merupakan kerawanan sosial bangsa Indonesia, (b) mencairnya perekat kesatuan dan persatuan bangsa di bawah tekanan globalisasi dan modernisasi yang lebih mengedepankan hal-hal yang bersifat kasat mata. Kemajuan yang antara lain ditandai oleh GNP, *income per capita*, produktivitas dan sebagainya, tidak mudah untuk memompakan hal-hal yang sifatnya mental ideologis. Terlebih lagi dengan tingkah laku para remaja yang sangat menggandrungi budaya global, maka masa depan wawasan kebang-

saan sebagai perekat sosial kelihatannya tidak terlalu menggembirakan; apalagi kalau dikaitkan dengan adanya kenyataan bahwa lembaga pendidikan hanya menyuguhkan pengajaran saja. Keadaan semacam ini membuka peluang yang amat luas bagi kemerosotan kedaulatan bangsa di dalam menghadapi tantangan mendatang yang antara lain berbentuk individualisme yang sangat bertentangan dengan asas kekeluargaan. Ada sebagian generasi muda yang merasa tertekan kaitannya dengan Pancasila, mengatakan bahwa ideologi bukan merupakan salah satu syarat bagi berdirinya satu negara, karena itu buat apa dipertahankan, apalagi dikeramatkan. Itulah kira-kira argumentasi dari generasi mendatang yang hidup dalam dunia tanpa batas, (c) primordialisme sebagai strategi politik dengan tujuan untuk menekan lawan atau pemaksaan kehendak, adalah pemanfaatan secara licik kerawanan bangsa yang amat mengkhawatirkan, oleh kelompok politik yang tidak yakin bahwa tujuan politiknya dapat tercapai, apa pun penyebabnya. Pada saat kampanye pemilu tiba atau pada saat menjelang dan selama sidang umum MPR maka terjadilah tontonan yang berupa pemanfaatan kelompok-kelompok primordial sebagai *pressure group* dengan ber-

bagai caranya. Di tingkat daerah terjadi hal yang sama pada saat pemilihan kepala daerah. Apabila kejadian semacam ini berlangsung lama atau dalam frekuensi yang semakin meningkat, maka irisan pemilahan sosial dapat berubah menjadi lebar yang menghalangi persatuan dan kesatuan bangsa dan NKRI.

Dengan memahami anasir-anasir dalam dan luar negeri seperti diuraikan di atas, maka hal yang paling jelek bagi Indonesia adalah apabila anasir dalam, ditumpangi oleh anasir luar. Ada semacam kecurigaan bahwa hal itu bisa terjadi setiap saat apabila kondisi di dalam negeri diwarnai oleh konflik politik berkepanjangan, dan *rule of law* tidak berjalan. Memahami itu semua maka diperlukan satu strategi pembinaan masyarakat.

Perkembangan Global, Regional, dan Nasional yang Berpengaruh

Dalam rangka menata geopolitik Indonesia yang perlu didukung oleh Ketahanan Nasional yang cukup tangguh, kita tidak dapat terlepas dari pengaruh global, regional dan nasional yang berpengaruh terhadap kehidupan nasional bangsa Indonesia.

Global

Berakhirnya Perang Dingin antara Blok Barat dengan Blok Timur, ditandai dengan makin dominannya kepentingan ekonomi dan perdagangan. Negara-negara maju dan yang sudah mapan menguasai sebagian besar modal dan teknologi, sehingga mendapatkan nilai tambah yang besar dari kegiatan eksploitasi sumber daya alam dan perdagangan internasional. Negara-negara berkembang termasuk Indonesia yang pada umumnya hanya memiliki potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia dengan kualitas yang masih rendah, hanya memperoleh nilai tambah yang relatif kecil, ditambah kekalutan kondisi dalam negeri, berakibat masih sangat tergantung pada modal dan teknologi dari negara maju. Di samping itu berbagai tuntutan pelanggaran HAM, prinsip perdagangan bebas, dan kelestarian lingkungan hidup, harus dipenuhi agar tidak dikenakan sanksi dan dunia internasional.

Regional

Perkembangan regional sangat dipengaruhi oleh kesepakatan tentang perdagangan bebas yaitu AFTA yang akan berlaku pada tahun 2003, dan APEC pada tahun 2020. Bila Indonesia tidak siap dengan daya

saing dan pengaturan perekonomian nasional yang kondusif, maka Indonesia hanya berperan sebagai obyek dan pasar dan negara maju dan negara tetangga ASEAN. Dalam kondisi Indonesia yang sedang terpuruk, solidaritas ASEAN juga tekesan menurun.

Nasional

Kehidupan nasional sejak pertengahan tahun 1998 sampai saat ini dalam kondisi terpuruk di bidang politik, ekonomi, sosial dan budaya, pertahanan dan keamanan. Di tingkat pusat terjadi konflik antar elite politik dalam rangka perebutan kekuasaan yang cenderung menghalalkan segala cara baik secara konstitusional maupun inskonstitusional, sehingga kurang perhatiannya terhadap konflik di daerah yang menuju ke disintegrasi bangsa. Sedangkan di tingkat daerah dengan dimulainya pelaksanaan otonomi daerah, mulai marak KKN yang diwarnai primordialisme suku, agama, dan daerah, yang mengakibatkan konflik horisontal dan pengusiran pendatang.

Peraturan pelaksanaan otonomi daerah pada saat ini sedang terus diproses, namun para pejabat daerah otonom cenderung kurang sabar. Bahkan ada yang telah mengambil langkah-langkah yang hanya mengun-

tungkan daerahnya sendiri, tanpa mempertimbangkan kepentingan nasional dan dampaknya terhadap beban warga masyarakat yang makin berat.

Akibat terjadinya kesenjangan sosial ekonomi yang sudah berlangsung cukup lama, maka warga masyarakat di daerah cenderung kembali ke primordialisme suku, etnis, agama, dan daerah. Berbagai konflik horisontal dan vertikal silih berganti, tanpa dapat diatasi secara tuntas oleh para penegak hukum dan aparat keamanan.

Potensi dan Peluang

Dalam kondisi krisis multidimensi dan keterpurukan kehidupan nasional, seperti yang telah diuraikan terdahulu, dan berbagai kendala dari perkembangannya global, regional dan nasional, perlu kita mengidentifikasi potensi dan peluang bagi peningkatan Ketahanan Nasional dan penataan demokrasi.

Dukungan Internasional

Cukup banyak pemerintahan negara di dunia yang mendukung persatuan bangsa Indonesia dan keutuhan wilayah NKRI (minus Timor Timur), termasuk Pemerintah AS di bawah pimpinan Presiden Bush Jr. dan pemerintah Australia, pemerintah PNG, dan negara-negara ASEAN. Dukungan tersebut per-

lu kita memanfaatkan sebaik-baiknya dalam rangka menghancurkan gerakan separatis bersenjata.

Komponen Bangsa yang Pancasila

Bertolak dari Pancasila sebagai falsafah/pandangan hidup bangsa dasar negara, dan ideologi nasional, masih cukup banyak komponen Bangsa Indonesia yang Pancasila baik di pusat maupun daerah, yang diharapkan dapat menjadi pelopor untuk mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Geopolitik dan Geostrategi

Geopolitik sebagai wawasan nasional dan geostrategi yang merupakan konsepsi ketahanan nasional dan sebagai konsep "survival" bangsa dan negara RI secara terus menerus dikaji ulang dan dimasyarakatkan melalui pendidikan di LEMHANNAS dan ceramah di berbagai forum di luar LEMHANNAS, diharapkan akan meningkatkan pemahaman akan pentingnya persatuan bangsa, keutuhan teritorial, eksistensi bangsa dan NKRI.

Masyarakat Indonesia yang Religius

Masyarakat Indonesia yang

pada umumnya religius merupakan peluang untuk menanamkan nilai-nilai agama yang benar dalam moral dan etika penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

TNI dan Polri yang Tetap Utuh

Walaupun telah mengalami hujatan, fitnah dan tarikan dari berbagai pihak, TNI dan Polri tetap utuh, TNI tetap memegang teguh Sapta Marga dan Polri tetap memegang teguh TRIBRATA, mempunyai komitmen yang tinggi terhadap persatuan bangsa, keutuhan NKRI dan suksesnya reformasi nasional.

Wilayah Indonesia dengan Sumber Kekayaan Alamnya

Wilayah Indonesia yang terdiri dari 17.000 pulau lebih dengan laut teritorial dan yurisdiksi nasional yang sangat luas, serta dirgantara di atasnya mengandung potensi sumber kekayaan alam yang sangat besar. Di samping itu wilayah Indonesia juga memiliki posisi yang strategis. Potensi dan posisi ini bila dapat diamankan, dikelola dan dimanfaatkan dengan baik akan mampu mendukung bangsa Indonesia keluar dari krisis ekonomi dan melanjutkan pembangunan nasional.

Supremasi Hukum

Supremasi hukum yang telah disepakati menjadi sasaran reformasi nasional, merupakan peluang yang perlu dimanfaatkan dalam mengatasi disintegrasi nasional dan penataan demokrasi Indonesia agar tidak menjurus ke anarkhi atau otoriter.

Langkah-langkah Strategis

Mengingat pada saat ini sedang dimulai pelaksanaan otonomi daerah diperlukan langkah-langkah strategis di tingkat nasional dan daerah otonom, serta partisipasi masyarakat sesuai dengan kerangka acuan sebagai berikut.

Tingkat Nasional

a. Memperkokoh persatuan bangsa dalam wadah NKRI, dengan cara: (1) meningkatkan penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, (2) meningkatkan pemahaman geopolitik dengan mengutamakan persatuan bangsa, keutuhan wilayah, dan kepentingan nasional, serta mengakhiri konflik antarpemimpin bangsa/elite politik, (3) memacu pembangunan nasional yang mampu mengurangi kesenjangan sosial dan ketidakadilan, (4) menyelenggarakan pendidikan nasional yang mampu me-

ningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia dan kesadaraan kebangsaan Indonesia, (5) penghormatan dan pemberdayaan nilai-nilai agama, budaya dan adat istiadat yang beraneka ragam untuk meningkatkan moral dan etika masyarakat.

b. Memperkokoh kembali geostrategi, dengan cara: (1) mewujudkan stabilitas keamanan berdasarkan supremasi hukum dan penghormatan terhadap HAM, (2) mewaspadai oknum-oknum subversif dari dalam dan luar negeri, (3) memberikan alokasi anggaran yang memadai bagi TNI dan Polri untuk meningkatkan profesionalisme dan kesejahteraan anggotanya, (4) pembangunan nasional yang berbasis pada sumber daya nasional dengan memperhatikan kelayakan lingkungan hidup.

c. Penataan demokrasi Indonesia dengan cara: (1) penataan hubungan antara lembaga tertinggi dan lembaga tinggi negara secara sinergik dalam kebersamaan dalam rangka menuju ke tujuan nasional, (2) menyiapkan perangkat hukum untuk mencegah timbulnya anarki dan otoriter, namun tetap memberikan peluang bagi pengawasan masyarakat, (3) pengaturan otonomi daerah yang tetap mengacu kepada Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional.

Tingkat Daerah dan Otonomi Daerah

a. Pemerintah Daerah Otonomi yang sedang berupaya keras untuk mewujudkan "*good governance*", dengan cara: (1) mengikis KKN yang mulai marak, (2) meningkatkan pelayanan masyarakat (*public service*), (3) melaksanakan pembangunan daerah untuk mengurangi kesenjangan sosial dan ketidakadilan.

b. Masyarakat Daerah Otonom yang rukun dan bersatu, dengan cara: (1) saling menghormati budaya, dan adat istiadat suku dan etnis yang ada di daerah, (2) peningkatan pemahaman tentang tanah air nusantara sebagai ruang hidup seluruh bangsa Indonesia yang beraneka ragam, (3) pemerintahan provinsi dalam melaksanakan otonomi daerah diperlukan kewenangan yang lebih besar, dibanding dengan pemerintahan kabupaten dan kota.

Khusus Anak Bangsa

Partisipasi anak bangsa dalam rangka menciptakan persatuan bangsa, Ketahanan Nasional dan otonomi daerah, dengan cara membantu meningkatkan: (a) kesadaran-kesemangatan kebangsaan Indonesia dalam wadah NKRI, (b) kesadaran bela negara, antara lain dengan mewaspadaikan oknum subversi dan provokator serta pelaku kriminal,

(c) disiplin nasional dan ketaatan hukum, (d) pengawasan sosial terhadap kinerja pemerintahan dan pembangunan nasional/daerah, (e) keamanan lingkungan pemukiman dan pekerjaan.

Penutup

Geopolitik Indonesia adalah Wawasan Nusantara yang menentukan prasyarat untuk mencapai data-data dan tujuan nasional yang tertuang dalam Pembukaan UUD 1945. Embrio geopolitik Indonesia secara arif telah diikrarkan oleh pendahulu bangsa dalam Soempah Pemoeda. Sedang geostrategi Indonesia adalah Ketahanan Nasional yang berisi kualitas keuletan dan ketangguhan bangsa, merupakan metoda umum dalam penyelenggaraan kehidupan nasional dan pembangunan nasional untuk mewujudkan kesejahteraan dan keamanan bangsa Indonesia.

Oleh karena itu menjadi kewajiban dari segenap anak bangsa Indonesia terutama para penyelenggara negara untuk memahami geopolitik dan geostrategi Indonesia, serta mampu mengembangkan dan mengaktualisasikan dalam penyelenggaraan kehidupan nasional dan pembangunan nasional.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan, bahwa meskipun

kondisi Ketahanan Indonesia saat ini sedang terpuruk, wajah demokrasi Indonesia diwarnai dengan anarkhi yang menuju disintegrasi bangsa, namun masih terdapat potensi dan peluang bagi bangsa Indonesia untuk memperkokoh kembali Ketahanan Nasional, keluar dari krisis, dan menata geopolitik dan geostrategi Indonesia. Dalam hal ini sangat tergantung pada kesadaran berbangsa yang merupakan jatidiri bangsa Indonesia dan semangat kebersamaan para pemimpin bangsa, elite politik, para elemen bangsa baik di pusat maupun di daerah, disertai keyakinan bahwa Allah swt. beserta kita.

Daftar Pustaka

1. UUD 1945
2. Huntington, Samuel A., *Benturan antar Peradaban dan Masa Depan Politik Dunia*, Qalam, Jakarta, 2000.
3. Suradinata, Ermaya, *Pengembangan Wilayah dan*
4. *Konsepsi Ketahanan Nasional*, Ramadan, Bandung, 1996.
5. LEMHANNAS, *Wawasan Nusantara*, Naskah Akademis LEMHANNAS, Jakarta.
6. LEMHANNAS, *Teori Dasar Geopolitik dan Geostrategi*, Naskah Akademis LEMHANNAS, Jakarta.
7. Soekarno, Presiden RI, *Pertahanan Nasional Dapat Berhasil Maksimal Jika Berdasarkan Geopolitik*, Sari Amanat pada Peresmian Lemhannas di Istana Negara, Jakarta, 20 Mei 1965.
8. Brzezinski, ZK, *The Grand Chessboard, American Primacy and its Geostrategic Imperatives*, Basic Book, Harper Collins Publishers, Inc. 1997.
9. Sugardo, Edi, *Teori Dasar Geo Politik Dan Geostrategi*, Lemhannas, Jakarta, 2001.
10. Sunardi, R.M., *Ketahanan Nasional Indonesia*, Lemhannas, Jakarta, 2001.
11. Suryosumarto, H. Budisantoso, *Ketahanan Nasional Indonesia, penangkal Disintegrasi Bangsa dan Negara*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.